

INTISARI

Latar belakang:

Undang-undang Pendidikan Kedokteran telah menyatakan bahwa residen memiliki hak atas perlindungan hukum, waktu istirahat dan insentif finansial atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Residen di rumah sakit pendidikan memiliki peran ganda yakni sebagai mahasiswa serta sebagai profesional pemberi layanan kesehatan kepada pasien. Ketidakjelasan status residen sebagai mahasiswa atau pekerja melatarbelakangi belum tersedianya standar pola pemberian insentif untuk residen di Indonesia meskipun telah diterbitkan berbagai regulasi untuk mendukung kebijakan tersebut.

Tujuan:

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan *benchmark* terhadap status hukum, pola pemberian insentif, jam kerja dan waktu istirahat residen di delapan negara untuk merumuskan rekomendasi model yang dapat diterapkan di rumah sakit pendidikan di Indonesia.

Metode:

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *desk research* serta menggunakan penelusuran dokumen dan informasi yang tersedia melalui metode *scoping study*. Penetapan negara dilakukan dengan metode purposive sampling. Data diekstrak dari literatur dan disintesis menggunakan formulir ekstraksi.

Hasil:

Berbagai negara menerapkan sistem *hospital-based* dengan status residen sebagai pekerja yang terintegrasi dalam sistem kesehatan nasional dibawah kementerian kesehatan negara tersebut. Pembiayaan kegiatan pendidikan dan insentif residen di berbagai negara berasal dari asuransi kesehatan nasional atau anggaran belanja pemerintah. Besaran insentif yang diberikan serupa dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dari negara tersebut dengan pola yang bersifat progresif sesuai dengan capaian tahapan pendidikan residen. Berbagai negara memiliki regulasi yang mengacu pada standar dalam pembatasan jam kerja dan waktu istirahat untuk residen. Rincian terkait insentif, jam kerja, waktu istirahat, serta hak dan kewajiban lainnya tertuang dalam kontrak individu residen dengan pemberi kontrak.

Kesimpulan dan Saran:

Indonesia dapat mengadopsi pola pemberian insentif residen dari berbagai negara dengan besaran insentif bersifat progresif sesuai tahapan pendidikan. Rincian terkait status hukum, insentif dan jam kerja tertuang dalam kontrak individu residen.

Kata kunci:

Residen, Status Hukum, Insentif, Jam Kerja, *Desk Research*, *Scoping Study*

ABSTRACT

Background:

The Law of Indonesia Number 20 Year 2013 on Medical Education states that residents are entitled for law protection, rest period and financial incentives for medical services they provided. Residents in teaching hospitals has a dual role of a student and a healthcare provider. The unclear legal status of a resident being a student or a workforce precedes the lack of governance regarding financial incentives for resident in Indonesia despite the presence of various regulations.

Objective:

The aim of this research is to perform a benchmark of how legal status, financial incentives system, work and rest hours of residents in eight countries around the world and recommend a system model to be adapted in teaching hospitals in Indonesia

Method:

Descriptive qualitative approach was used in this desk review research. Informations were obtained from documents, academic paper and official websites through scoping study method using internet search engines and academic databases. Data collection process was using purposive sampling method. Data were screened and extracted using a self-developed extraction form.

Result and discussion:

Countries around the world mainly used hospital-based system for residency training. The residents were considered as healthcare worker in respective national healthcare system. Funding for resident training and salary is provided by either health insurance or government budget. The amount of salary provided to residents were similar to Gross Domestic Product (GDP) per capita of the country, with increments according to stages of residency. Countries have published recommendations and regulations for resident duty hour. Details of salary, incentives, benefits and responsibilities of the resident were inscribed in the contractual agreement between resident and employer.

Conclusion and recommendation:

Indonesia could adopt an incentive system for resident from various countries which implements a progressive increment according to the increased competency. Details about legal status, incentives, and duty hour should be written in individual contracts between the resident and its teaching hospital.

Keywords:

Resident, Incentives, Legal Status, Duty Hour, Desk Research, Scoping Study